

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya virus yaitu *corona virus* jenis baru (*SARS-CoV-2*) dan penyakitnya disebut *corona virus disease* 2019 (*covid-19*). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019, sampai saat ini berdasarkan data WHO dan PDPI (Yuliana, 2020: 187).

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya menurut data WHO pada tanggal 31 Maret. Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan *covid-19* sebagai pandemi. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian diseluruh dunia. Berdasarkan data WHO (Adityo Susilo dkk, 2020: 45).

Virus ini pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus berdasarkan data WHO dan menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia pada 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian (Adityo Susilo dkk, 2020: 46).

Pandemi *covid-19* telah merubah perekonomian Indonesia, dibuktikan dalam rangka pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganannya termasuk di desa-desa terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa (Sarip dkk, 2020: 11). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa/Kelurahan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang dalam

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan bahwa desa memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi murni, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat yang tercipta dalam bentuk kinerja pemerintah desa yang lebih baik. Kinerja pemerintah desa tidak terlepas dengan adanya akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula tentang laporan yang dibuat oleh pemerintah desa. Hal tersebut bisa menggambarkan tentang kinerja pemerintah desa yang dapat dinilai oleh masyarakat dan badan permusyawaratan desa sehingga kinerja pemerintah desa akan menjadi lebih baik. Dalam pencapaian kinerja pemerintah desa yang baik maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik pula agar kinerja pemerintah desa memiliki kualitas yang baik. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah desa yang baik dan berpihak terhadap rakyat.

Kinerja menurut (Hasibuan, 2014: 94) bahwa yang dimaksud dengan kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atas dasar kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan tepat waktu.

Menurut Moehariono (2012: 95) kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja pemerintah

desa harus diukur agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Tolak ukur kinerja mencakup yaitu: unsur keberhasilan (*output*) dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan (*outcome*). Pengukuran kinerja instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat tentang informasi publik terutama tentang dana bantuan desa selama *covid -19* yang seharusnya dapat diakses dengan mudah. Selain adanya pertanggungjawaban dan transparansi diperlukan pula peran badan permusyawaratan desa dalam menyampaikan aspirasi atau kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh transparansi. Menurut Mardiasmo (2018: 18) mengatakan bahwa Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Transparansi berarti pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa yang dikhususkan dalam penelitian ini adalah dana bantuan desa harus secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat yang harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa “transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Adapun prinsip transparansi yaitu untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Kusuma, 2012: 51).

Selain transparansi yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi sangat berhubungan karena dengan adanya transparan atau keterbukaan maka apabila terjadi kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2018: 27), mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam pemerintah desa adalah bagaimana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan wewenang dan kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan finansial untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk dana desa yaitu dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya dana desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran dana desa yang diberikan kepada setiap desa menurut adanya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan juga bahwa kinerja adalah keseluruhan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pengukuran kinerja ini tentunya diperlukan untuk menilai tingkat pencapaian dalam memberikan pelayanan publik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dapat diukur dengan konsep *value for money*. "*Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi" (Mardiasmo, 2018: 4).

Sehingga dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, setiap pemerintah desa diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan serta memberikan pernyataan tanggung jawab atas pelaporan tersebut. Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana *covid-19* diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan bentuk pengendalian terhadap kinerja aparatur pemerintah desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD bisa juga disebut dengan Badan Parlemen Desa yang

anggotanya perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Permendagri No.110/2016 disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga pengalokasian dana bantuan desa pada masa *covid-19* dalam upaya pencegahan dan penanganan *covid-19* akan dapat disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa, diharapkan akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa pula.

Fenomena Transparansi dan Akuntabilitas dibicarakan sebagai ungkapan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan dana bantuan desa dalam mengalokasikan serta menyalurkan Dana Bantuan *covid-19* seperti Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) antar Desa. Kemudian lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada publik untuk memperoleh hak dalam mengakses informasi, termasuk informasi keuangan daerah. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah desa dikarenakan semua informasi yang berkaitan dengan desa baik dalam hal keuangan ataupun yang lainnya bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Adapun studi empiris terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vebian (2019) dengan Judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah” di KPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah desa.

Deti Kumalasari (2016) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Fanny Jitmaw, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017) dengan Judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Interen Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah” di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, transparansi dan fungsi pemeriksaan interen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Lucy Auditya, Huaini, Lismawati (2013) dengan Judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” di Provinsi Bengkulu. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Matia Andriani (2019) dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa” di Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Risya Umami, Idang Nurodin (2017) dengan Judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” di Kecamatan Surade. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada pengelolaan keuangan desa.

I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019) dengan Judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” di Kec. Abiansenal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Anita Firdaus, Suharno, Sunarti (2020) dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa” di Desa Siduarjo, Kec. Siduarjo, Kab. Suragen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) dengan Judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” di Kabupaten Bulengleng. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulengleng.

Mayangsari Putri, Suharno, Bambang Widarno (2018) dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa” di Desa Majenang Sukodono Sragen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

Tabel 1. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah,	Variabel Penelitian: Transparansi	Variabel Penelitian Sekarang:	Hasil penelitian tersebut menunjukkan	Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas

	Diandra Pepi Vebian (2019) dengan Judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” (pada KPD Kabupaten Bandung Barat)	Akuntabilitas Kinerja Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Teknik Analisa Data: Regresi Linier Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah desa	Widyatama Vol. 10 No. 1 Maret 2019
2	Deti Kumalasari, (2016) dengan Judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Studi di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi).	Variabel Penelitian: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Variabel Penelitian Sekarang: Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa <i>Covid-19</i> Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5 No. 11 November 2016 ISSN: 2460-0585
3	Fanny Jitmaw, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2017) dengan Judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan	Variabel Penelitian: Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel Penelitian: Fungsi Pemeriksaan Interen Variabel Penelitian Sekarang: Dana Bantuan Desa pada	Hasil penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah	Jurnal Riset Akuntansi dan <i>Auditing Goodwill</i> Vol. 8 No. 1 2017 e-ISSN: 2715-1859

	Interen Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah” (Studi empiris di Kabupaten Sorong).		masa <i>covid-19</i> Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	daerah, transparansi dan fungsi pemeriksaan interen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	
4	Lucy Auditya, Huaini, Lismawati (2013) dengan Judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (di Provinsi Bengkulu).	Variabel Penelitian: Akuntabilitas Transparansi Kinerja Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Variabel Penelitian Sekarang: Dana Bantuan Desa pada masa <i>covid-19</i> Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Journal Fairness Vol. 3 No.1 2013 ISSN: 2303-0348
5	Matia Andriani (2019) dengan Judul “Pengaruh	Variabel Penelitian: Transparansi Akuntabilitas	Variabel Penelitian: Partisipasi masyarakat	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan transparansi,	e-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi

	<p>Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa” (Studi kasus pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa).</p>	<p>Teknik Pengumpulan Data Kuesioner</p>	<p>Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Penelitian Sekarang:</p> <p>Kinerja Pemerintah Desa pada masa Covid-19</p> <p>Dana Bantuan Desa pada masa covid-19</p> <p>Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda</p> <p>Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)</p> <p>Tempat Penelitian</p>	<p>Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.</p>	<p>Sumbawa Vol.1 No. 2 2019</p>
6	<p>Risya Umami, Idang Nurodin (2017) dengan Judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” di Kecamatan Surade.</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <p>Transparansi dan Akuntabilitas</p> <p>Teknik Pengumpulan Data Kuesioner</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <p>Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Variabel Penelitian Sekarang:</p> <p>Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa</p> <p>Kinerja Pemerintah</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa, transparansi dan</p>	<p>Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 6 Edisi 11 2017 ISSN: 20886969</p>

			Desa pada masa <i>covid-19</i> Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada pengelolaan keuangan desa.	
7	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019) dengan Judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa” (di Kec. Abiansenal).	Variabel Penelitian: Akuntabilitas Transparansi Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Variabel Penelitian: Partisipasi Masyarakat pada Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Variabel Penelitian Sekarang: Kinerja Pemerintah Desa pada masa <i>covid-19</i> Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.	e-Journal Akuntansi Vol. 28 No. 1 2019 ISSN 2302-8556

			: Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian		
8	Anita Firdaus, Suharno, Sunarti (2020) dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (di Desa Siduarjo, Kec. Siduarjo, Kab. Suragen).	Variabel Penelitian: Akuntabilitas Transparansi Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Variabel Penelitian: Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Variabel Penelitian Sekarang: Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Kinerja Pemerintah Desa pada masa <i>covid-19</i> . Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 Tahun 2020
9	Made Budi Sastra Wiguna, Gede	Variabel Penelitian: Akuntabilitas	Variabel Penelitian: Pengawasan	Hasil penelitian tersebut	e-Journal 1 Ak Universitas

	Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015) dengan Judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (di Kabupaten Bulengleng).	Transparansi Kinerja Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Keuangan Daerah Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	menunjukkan pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Bulengleng.	Pendidikan Ganesha Vol. 3 No. 1 2015
10	Mayangsari Putri, Suharno, Bambang Widarno (2018) dengan Judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa” (studi kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen).	Variabel Penelitian: Transparansi Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Desa Teknik Pengumpulan Data Kuesioner	Variabel Penelitian: Pengawasan Keuangan Desa Teknik Analisa Data: Regresi Linear Berganda Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan : Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) Tempat Penelitian	Hasi penelitian tersebut menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14 No.1 2018

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa dan Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Secara Parsial Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
3. Bagaimana Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Secara Simultan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa dan Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Secara Parsial Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Secara Simultan Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa *Covid-19* pada desa-desa di kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Singaparna

Hasil Penelitian Ini Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Singaparna pada waktu yang akan datang.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan serta bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 10 Desa yang berada di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis melaksanakan penelitian dengan pendekatan sensus di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat selama 10 bulan yaitu dari

Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 yang terlampir pada (lampiran 1).